



BUTIR-BUTIR KESEPAKATAN

SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2020 Jogjakarta, 15 September 2019

Kami Peserta kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 12 - 15 September 2019 bertempat di Hotel Novotel Yogyakarta, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan secara intensif semua revisi anggaran yang akan dilakukan baik revisi DIPA Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan kepada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial.
2. Mengkoordinasikan penunjukan petugas pelaporan kinerja dan mendorong pelaporan kinerja secara online setiap bulan/triwulan melalui Aplikasi pelaporan sebagai berikut:
 - Aplikasi Smart DJA Kemenkeu
 - Aplikasi E-Monev Bappenas
 - Aplikasi kinerjaku Kemensos
3. Dinas Sosial Provinsi melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten dan membantu penyelesaian masalah dalam pelaksanaan TP Kabupaten.
4. Dinas Sosial Provinsi menyampaikan laporan kinerja (Lkj) pada akhir tahun anggaran 2019 kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah disepakati di awal tahun.
5. Melakukan sosialisasi SLRT dan Puskesmas kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagai persiapan penumbuhan SLRT dan Puskesmas tahun 2020.
6. Lahan untuk lokasi pemberdayaan KAT harus bebas dari permasalahan status lahan (*clear* dan *clean*) dan didukung rekomendasi dari Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan.
7. Pembangunan sarana lingkungan di lokasi KAT disesuaikan dengan tahun pemberdayaan. Adapun bentuk sarana lingkungan untuk lokasi KAT tahun I adalah Balai Sosial sedangkan untuk lokasi KAT tahun II bentuknya adalah sarana air bersih/MCK atau memperhatikan kebutuhan.
8. Kegiatan sosialisasi UGB dan PUB melalui dana Dekonsentrasi disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing daerah.
9. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, biaya pemeliharaan TMPN Provinsi dan honor petugas TMPN tahun 2020 tidak dianggarkan oleh Pusat, untuk itu biaya tersebut agar diakomodir dalam APBD.
10. Target prioritas nasional tahun 2020 (TKSK, PSM, Dunia Usaha, Pemberdayaan KAT, SLRT dan Puskesmas) yang pemenuhannya melalui dana Pusat, Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan, tidak dapat dilakukan perubahan/revisi.
11. Bimbingan teknis bagi pilar-pilar sosial yaitu TKSK, Karang Taruna, LKS, WKSBM, dan LK3 serta bantuan biaya operasional untuk LK3, Pengurus Karang Taruna Provinsi, Ikatan PSM, dan LKKS Provinsi maupun orientasi dan seleksi pilar-pilar sosial teladan, tidak dialokasikan melalui anggaran dana Dekonsentrasi pada tahun 2020 mengingat terbatasnya alokasi anggaran di Kementerian Sosial.

Demikian, kesepakatan yang perlu segera ditindaklanjuti dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial tahun 2019 dan rencana pelaksanaan tahun 2020.

PERWAKILAN DAERAH

No	Provinsi	Nama	Tanda Tangan
1	DKI Jakarta	Rita Indah Yulistanti, S.ST, M.Si	
2	Jawa Barat	Hj. Elis Kartini, M.Si	
3	Jawa Tengah	Endah Dwi Setiorini, SH, MH	
4	DI Yogyakarta	Dra. Retno Basundari, MM	
5	Jawa Timur	Prasetyo Adi Widodo, S.Sos, M.Si	
6	Aceh	Mutaqqin, STP, MM	
7	Sumatera Utara	Cut Nurhayati, S.Sos	
8	Sumatera Barat	Dra. Elvita	
9	Riau	Alfrida Julina, SH., M.Si	
10	Jambi	Azhari, A.KS, M.E.I	
11	Sumatera Selatan	Agus Winardi, SE, MM	
12	Lampung	Dra. Ida Yulisnawati	
13	Kalimantan Barat	Drs. Mustafa Luthfi, M.Si	
14	Kalimantan Tengah	Suryanto, A.KS., M.Si	
15	Kalimantan Selatan	Mugeni, S.Sos	
16	Kalimantan Timur	Drs. Ayi Hikmat, M.Si	
17	Sulawesi Utara	Karimun Pangaribuan, S.Sos	
18	Sulawesi Tengah	Son, SE., MM	
19	Sulawesi Selatan	Ir. Hj. Hermawaty, M.Si	
20	Sulawesi Tenggara	Drs. Kamaruddin	

No	Provinsi	Nama	Tanda Tangan
21	Maluku	Drs. R. Soamole.M.Si	
22	Bali	Dra. Ni Luh Putu Budiari, MMA	
23	Nusa Tenggara Barat	Faesal Ahmadi, SAP	
24	Nusa Tenggara Timur	Bernadus Sa,S.Sos	
25	Papua	Johannes H. Winerungan, SH	
26	Bengkulu	Dra. Efrilda Iriani	
27	Maluku Utara	Syahril Ahmad	
28	Banten	Tb. Sirojuddin, S.Ag.,M.Si	
29	Kep. Bangka Belitung	Ir. Ria Meliyati Situngkir,MM	
30	Gorontalo	Budi Susanto Yunus,SST.MPS.Sp	
31	Kepulauan Riau	Hj. Ellya Yusma, S.Sos,M.Ph	
32	Papua Barat		
33	Sulawesi Barat	H. Andi Farid Kusno, S.Sos	
34	Kalimantan Utara		

**Mengetahui,
Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial**


Arif Nahari